

DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/publika.v10i1.7277>

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>



Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Pariwisata Balkondes Giritengah di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Kiki Hardiyanti¹⁾, Hartuti Purnaweni²⁾, Sundarso³⁾

^{1),2),3)}Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Abstrak

Balkondes merupakan program dari Kementerian BUMN yang konsepnya berasal dari rancangan para Kades di Kecamatan Borobudur pada tahun 2013 dengan konsep Gerai Ekonomi Desa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata melalui Balkondes Giritengah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Indikator yang digunakan memiliki enam tahapan yaitu yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif, performalisasi rencana, pelaksana kegiatan, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap persiapan belum optimal karena konsep Balkondes diinisiasi oleh para kades di Borobudur namun dibuat secara top down. Tahap pengkajian belum optimal karena pengkajian tidak dilakukan menyeluruh. Tahap perencanaan alternatif kegiatan belum optimal karena potensi yang ditampilkan di etalase Balkondes harus mendapat izin dari Kades. Tahap pemformalisasi kegiatan sudah optimal karena dana terpenuhi. Tahap pelaksana belum optimal akibat konflik vertikal antara BUMN dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Tahap evaluasi menjelaskan tidak sinergisitasnya BUMN dan Pemkab Magelang sehingga berdampak terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Pariwisata, Balkondes, Giritengah

Abstrack

Balkondes is a program from the Ministry of BUMN whose concept came from the design of the Village Heads in Borobudur District in 2013 with the concept of the Gerai Ekonomi Desa. The purpose of this study is to describe and analyze community empowerment strategies in the tourism sector through Balkondes Giritengah. The method used is qualitative research. The indicators used have six stages, namely the preparation stage, assessment, alternative planning, plan performance, implementing activities, and evaluation. The results showed that the preparation stage was not optimal because the Balkondes concept was initiated by the village heads in Borobudur but was made on a top-down basis. The assessment stage is not optimal because the assessment is not carried out thoroughly. The planning stage for alternative activities is not optimal because the potential displayed in the Balkondes storefront must obtain permission from the village head. The activity formalization stage has been optimal because the funds have been met. The implementation stage has not been optimal due to the vertical conflict between BUMN and the Magelang Regency Government. The evaluation stage explains the lack of synergy between BUMN and the Magelang Regency Government so that it has an impact on the community.

Key Words: Tourism, Balkondes, Giritengah

How to Cite: Hardiyanti, K., Purnaweni, H & Sundarso. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Pariwisata Balkondes Giritengah di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. *PUBLIKAUMA: Jurnal Administrasi Publik UMA, 10 (1): 49-60*

*Corresponding author:
E-mail: kikihardiyanti10@gmail.com

ISSN 2549-9165 (Print)
ISSN 2580-2011 (Online)

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan salah satu hal yang dapat menentukan seseorang untuk dapat hidup layak melalui mata pencahariannya sehingga dapat terpenuhi kebutuhannya untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pencapaian kesejahteraan berdasarkan pendataan pemerintah memiliki hubungan yang erat dengan jumlah penduduk miskin pada suatu daerah, salah satunya Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang mengalami kenaikan garis kemiskinan pada tahun 2015 hingga 2020 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020 oleh Badan Pusat Statistik tentang Profil Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2020, bahwa tahun 2015 berjumlah 253.866, 2016 berjumlah 271.800, 2017 berjumlah 281.237, tahun 2018 berjumlah 286.327, tahun 2019 berjumlah 325.921, dan tahun 2020 berjumlah 342.430.

Garis kemiskinan berkaitan dengan standar pendapatan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Naiknya grafik dipengaruhi oleh adanya perubahan bahan pokok, sandang, maupun pangan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah dengan menggali potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, salah satunya melalui pariwisata, karena Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang memiliki banyak aset pariwisata.

Pariwisata Magelang tidak hanya terkenal di tingkat nasional tetapi juga internasional yaitu Candi Borobudur. Dilihat dari Encyclopedia Britanica, sebuah yayasan di Swiss pada tahun 2000

meluncurkan sebuah kampanye melalui *polling online* untuk menentukan tujuh keajaiban dunia yang kemudian didukung oleh 100 juta lebih orang di seluruh dunia. Salah satu yang menjadi pilihan yaitu Candi Borobudur. Namun, sayangnya Candi Borobudur saat ini justru masuk dalam daftar *The Forgotten Wonders* karena kurang dikenal oleh arsitek dan sejarawan dunia. Walaupun demikian, UNESCO masih mengakui Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia (Gischa, 2019), namun kepopuleran Candi Borobudur harus ditingkatkan.

Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi dari 10 destinasi prioritas di Indonesia yang merupakan amanat presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015. Isinya adalah tentang arahan presiden mengenai pariwisata dan arahan presiden di Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016. Dengan demikian, Candi Borobudur memiliki posisi yang cukup penting untuk diperhatikan dalam perkembangan pariwisatanya (Fatimah, 2018:566). Selain itu, Kanki dan Taylor dalam (Fatimah, 2018:566) menyebutkan bahwa desa-desa yang terletak di sekitaran wilayah Candi Borobudur dibatasu oleh lima gunung yang merupakan satu kesatuan utuh sehingga penting untuk di jaga kelestariannya disebut sebagai Pusaka Saujana Borobudur (*Borobudur Cultural Landscape Heritage*).

Candi Borobudur memang merupakan salah satu pariwisata budaya dan religi yang paling memikat di Indonesia dan memiliki minat pengunjung yang tinggi. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2015 ketika mengunjungi kawasan Candi Borobudur berpendapat bahwa “bagaimana bisa, Borobudur yang sudah sangat terkenal namun desa-desa yang berada di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat”. Kemudian Rini Soemarmo

selaku Menteri BUMN (ANTARANEWS.com) membuat suatu program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) sebagai wujud dukungan BUMN dalam program pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Indonesia dan mengangkat perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Borobudur.

Kurangnya minat wisata di sekitar Candi Borobudur dikarenakan masih kurangnya promosi terhadap wisata desa-desa selain Candi Borobudur (Firmansyah, 2019). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar Kawasan Borobudur perlu dilakukan untuk menunjang dan menggali potensi lokal. Selain itu, waktu kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur relatif singkat sehingga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mendapatkan manfaat dari kunjungan para wisatawan.

Arintoko (2018:55) menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan dan kemajuan desa wisata dipengaruhi oleh jarak atau lokasi dari kawasan Candi Borobudur. Rata-rata desa yang relatif berkembang dan memiliki kunjungan wisata yang lebih besar terletak di sebelah selatan kawasan Candi Borobudur, seperti Borobudur, Candirejo, Wanurejo, Tuksungo, Majaksingi, Karangrejo, dan Tanjungsari, karena didukung oleh pemandangan Candi Borobudur yang tampak dari wilayah tersebut dan pemandangan alam desa berupa perbukitan yang menarik. Desa terjauh yaitu Giripurno dengan jarak 10 km, Giritengah dan Bigaran dengan jarak 7 km. Kemudian, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Jawa Tengah Tahun 2018 mencatat bahwa di Kecamatan Borobudur terdapat tiga desa yang masih masuk dalam zona merah kemiskinan, yaitu Giritengah, Wringinputih, dan Ngadiharjo.

Balkondes merupakan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan

sebuah langkah-langkah yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pemberdayaan masyarakat dalam (Sururi, 2015:2) sebagai sebuah strategi saat ini sudah banyak diterima, yaitu sebagai suatu konsep pembangunan dengan merangkum nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat kemudian mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people centered*. *People centered* yaitu memusatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Pemberdayaan masyarakat secara konseptual diartikan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat masyarakat dari kondisi saat ini yang tidak mampu keluar dari perangkap keterbelakangan.

Strategi pemberdayaan pada hikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat (Anwas, 2013: 89). Pemberdayaan masyarakat menurut Soekanto (Soekanto, 1987:63) dalam penyelenggaraannya memiliki tujuh tahapan yang dilakukan, yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif kegiatan, tahap pemformalisasi rencana aksi, tahap pelaksana kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka digunakan strategi pembedayaan masyarakat untuk melihat program Balkondes khususnya Balkondes Giritengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara disesuaikan dari observasi lapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dalam (Sugiyono, 2016:218-219) merupakan teknik penentuan untuk menentukan narasumber berdasarkan tujuan dan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dianggap paling tahu tentang pemberdayaan

mengenai program Balkondes Giritengah. Narasumber tersebut adalah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Magelang, Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Magelang, Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Magelang, Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinsparpora Kabupaten Magelang, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dispermades Kabupaten Magelang, staff PT. Manajemen CBT Nusantara, Manajer Balkondes Giritengah, Pak Tijab. Kemudian, analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pemberdayaan masyarakat yang akan diteliti yaitu mengenai keterkaitan antara para pihak dalam membuat, melaksanakan, dan keberlanjutan dari program Balkondes seperti BUMN, Pemkab Magelang, dan masyarakat kawasan Borobudur khususnya Desa Giritengah. Strategi pemberdayaan masyarakat yang digunakan berdasarkan enam strategi menurut Soekanto, dijabarkan pada sub subbab berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah proses awal untuk memulai strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Pencanangan program Balkondes sudah ada sebelum Bu Rini atau dari pihak pemerintah yang mencanangkan, melainkan sudah dimulai pada tahun 2013 dengan perencanaan yang sederhana dan waktu yang singkat. Perencanaan itu mulai disusun ketika Pilkada selesai, kemudian para Kades baru dilantik dan dengan semangat baru pula para Kades kemudian bermusyawarah karena melihat kondisi masyarakat yang ada disekitar Kawasan Candi Borobudur belum sejahtera dan masuk ke dalam garis merah kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan

Wilayah Bappeda Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

“Kita sempat diskusi dengan tokoh di Borobudur bahwa awal mulanya dulu tahun 2013 Kecamatan Borobudur ini dikategorikan sebagai kecamatan termiskin dengan adanya Candi Borobudur dan menjadi keprihatinan nasional. Kemudian sering dilakukan *Forum Group Discussion* atau FGD dari tokoh-tokoh masyarakat, tepatnya setelah pilkades 2013. Tokoh kemudian menyampaikan ke Taman Wisata Candi (TWC) karna dianggap bisa memberi solusi. Dari hasil FGD kemudian muncullah Gerai Ekonomi Desa yang dicetuskan salah satu tokoh yang kemudian di adopsi idenya, kemudian di ganti namanya menjadi Balai Ekonomi Desa”. (Wawancara, 21 Desember 2021)

Balai Ekonomi Desa atau disingkat sebagai Balkondes sudah ada rancangannya sejak 2013, rancangan tersebut bernama Gerai Ekonomi Desa, kemudian rancangan tersebut disampaikan ke TWC guna bisa tersalurkan menjadi program sebagai solusi dari keprihatinan masyarakat. Gerai Ekonomi Desa konsepnya di adopsi oleh BUMN, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja BUMN. Program Balkondes tersebut masih belangsung hingga sekarang. Staf dari Manajemen CBT Nusantara (MNC), menyampaikan mengenai persiapan Balkondes sebagai berikut:

“Sejarah awal mulanya kebijakan bahwa pemerintah pusat atau presiden itu ingin pendapatan negara itu ada sumbangan lebih dari sektor pariwisata, kemudian presiden memberikan otoritas kepada kementerian salah satunya BUMN untuk support kegiatan pariwisata di Indonesia, tujuannya pendapatan negara. BUMN kemudian membuat program-program di sepuluh destinasi super prioritas, salah satunya Borobudur”. (Wawancara, 22 Desember 2021)

Program Balkondes merupakan upaya peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Lima destinasi super prioritas dalam (Sugiarto, 2020:18) menyebutkan lima yaitu Mandalika, Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, dan Borobudur. Kemudian, Candi Borobudur merupakan destinasi super prioritas karena masuk dalam Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) yang mana telah ditetapkan sebagai salah satu KSPN Prioritas atau "10 Bali Baru" berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, bahwa Kementerian PUPR terus mendukung pengembangan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam rangka mendorong peningkatan kunjungan domestik dan mancanegara, salah satu caranya dengan peningkatan kualitas rumah untuk pengembangan usaha pondok wisata atau *homestay* dan usaha pariwisata lainnya. Diharapkan dengan dilakukannya penataan dan pengembangan pondok wisata Candi Borobudur dapat menciptakan penataan ruang publik, dan sektor pariwisata dapat menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja. Dengan adanya hal tersebut, maka hal ini sejalan dengan program Balkondes yang dicetuskan.

Tahap Pengkajian

Tahapan pengkajian adalah proses mengidentifikasi yang dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan atau masalah yang sedang terjadi serta mengetahui sumber daya yang dimiliki. Balkondes sebagai wujud usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa, apalagi Desa Giritengah pada tahun 2018 masuk ke dalam zona merah kemiskinan, dimana Balkondes dibangun tahun 2016-2017. Namun ternyata, Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda

Kabupaten Magelang menyampaikan bahwa tidak adanya kajian yang dilakukan, sebagai berikut:

"Nggak ada penelitian terlebih dahulu ke lapangan, jadi ada dana ya udah bangun. Kita yang di daerah itu kadang sedih, yang pusat itu punya banyak dana tapi menurut kami mereka yang punya uang ya suka-suka mereka, sebenarnya kita itu butuh apa bukan mereka inginnya apa, pusat itu inginnya apa disini bukan memenuhi apa yang kita butuhkan. *Top down* banget lah". (Wawancara, 21 Desember 2021)

Kemudian Staf MNC menyampaikan, sebagai berikut:

"Nggak ada penilaiannya dulu sebelum membangun, makanya itu kesalahannya". (Wawancara, 22 Desember 2021)

Pemerintah pusat tidak melakukan pengkajian terlebih dahulu terkait wilayah Borobudur, melainkan menggunakan pendekatan *top down* yang kemudian lebih mengedepankan konsep pusat tanpa melibatkan kebutuhan maupun keinginan masyarakat yang dituju.

Sejarah Borobudur jika ditarik lebih jauh, pada tahun 2008 dalam (Harsana, 2015: 1-2) Candi Borobudur wisata yang terkenal di dunia dengan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara ternyata Desa Borobudur yang menjadi tempat keberadaan Candi Borobudur menjadikan desa ini sebagai desa termiskin kedua di Kecamatan Borobudur, dan Kecamatan Borobudur menjadi kecamatan keempat termiskin dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang yaitu 21 kecamatan. Tahun 2015 dalam (Aditya, 2019), menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 terdapat lima hingga enam dari 20 desa di Kecamatan Borobudur masuk sebagai desa termiskin di Jawa Tengah. Kemudian tahun 2018 masih ada tiga desa yang masuk dalam zona merah kemiskinan.

Tahap Perencanaan Alternatif Kegiatan

Tahap perencanaan alternatif kegiatan yaitu penyelenggaraan sebagai agen perubahan yang berpartisipasi dengan melibatkan warga secara bersama-sama mencari solusi terhadap masalah yang sedang mereka hadapi, dengan harapan masyarakat memikirkan beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilakukan. Staf MCN mengenai program Balkondes kemudian menyampaikan sebagai berikut:

“Program Balkondes itu sebetulnya program pengembangan potensi desa yaitu pengembangan potensi desa tentunya terdapat pemberdayaan masyarakat, tujuan untuk peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari potensi desa yang dikembangkan itu akan mempunyai dampak ekonomi terhadap masyarakat, potensi desa ini akan menjadi daya tarik wisata. Program besarnya begitu. Jadi sebenarnya Balkondes itu program pemberdayaan masyarakat, kemudian Balkondes dan *homestay* sebagai fasilitas penunjang program untuk kegiatan ekonomi masyarakat”. (Wawancara, 21 Desember 2021)

Program besar Balkondes adalah pengembangan desa wisata, dengan pengangkatan potensi desa maka daya tarik desa akan meningkat, sehingga dampak wisata berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Selain itu, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, akan adanya *homestay* sebagai fasilitas penunjang dan juga etalase Balkondes untuk menampilkan produk potensi desa. Produk unggulan Desa Gititengah adalah Madu Organik pak Bambang. Pak Bambang berawal dari hobi menjadi usaha lebah madu yang sudah dirintis sejak lama, mulai tahun 1984 atau 1985. Madu yang dihasilkan dari ternak lebah Pak Bambang yaitu Kaliandra, Insulin, Bee Polen, dan Purwaceng. Desa Giritengah terkenal dengan keseniannya, salah satunya yang

terkenal adalah Sanggar Ngestigiri milik Pak Tijab, sebagai berikut:

“Sanggar Ngestigiri sejak 2014 sudah diresmikan Disparpora dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan sudah didampingi UNESCO. Jadi sebelum ada Balkondes sudah berjalan, sudah 11 tahun sudah menerima kunjungan tamu domestik maupun luar negeri dipembinaan kurang lebih ada 11 ribu orang yang masuk sanggar Pak Tijab. Bisa melayani satu pewayangan dalang entah karawitan, kesenian kuda lumping, seni dulalak, cokean, sama ketoprak.”. (Wawancara, 15 Desember 2021)

Sanggar Ngestigiri sudah dikunjungi oleh lebih dari 11 ribu pengunjung dalam negeri dan luar negeri. Walaupun tempatnya terpencil, bahkan Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo dan Didi Kempot pernah berkunjung. Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Foto Ganjar Pranowo dan Didi Kempot
Sumber: Data Olahan Peneliti

Tahap Formalisasi Rencana Aksi

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Kemiskinan, memiliki empat strategi dasar dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.

Rumusan dalam proses rencana program Balkondes di inisiasi oleh Kementerian BUMN dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2017

tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 Ayat (8) disebutkan sebagai sebuah strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan juga kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa asal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga, dalam upaya pengentasan kemiskinan disuatu daerah perlu adanya pemberdayaan masyarakat, karena mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah saja melainkan masyarakat harus turut berpartisipasi dalam kegiatannya.

Konsep Balkondes yaitu ada resto, pendopo, *homestay*, dengan corak yang berbeda. BUMN memiliki perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya, sebagian besarnya memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR dalam (Kurniawan, 2020:879) dijelaskan sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan tanggung jawab perusahaan, kemudian menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Staf MCN kemudian menjelaskan terkait CSR, sebagai berikut:

“Pembiayaannya oleh BUMN sponsor karna program ini kan *one village one BUMN sponsor, one village one product*, kemudian posisi lembaga BUMN yang ditunjuk sebagai pendamping ini seperti pengelola program bukan pengelola manajemennya”. (Wawancara, 22 Desember 2021)

CSR dalam program Balkondes adalah sebagai sponsor. Sponsor masing-masing memegang satu desa (satu Balkondes). Kemudian Kementerian BUMN bersepakat dengan BUMN-BUMN lainnya untuk membentuk suatu badan khusus guna melakukan pengawasan serta manajemen bagi seluruh Balkondes, sehingga terbentuklah PT. Manajemen CBT Nusantara.

CBT merupakan singkatan dari *Community Based Tourism*, dalam (Arifin, 2017:113) diartikan sebagai konsep pengembangan destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dan penyertaan mereka dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Kemudian, konsep CBT menurut Nurhayati dalam (Arifin, 2017:113) dijelaskan sebagai sebuah pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan merangkul masyarakat atau komunitas dalam berbagai kegiatan pariwisata.

Tahap Pelaksana Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini lebih berfokus kepada pendampingan yang dilakukan oleh MCN, selain karena MCN khusus untuk pendampingan Balkondes, dan mengingat bahwa salah satu latar belakang pengambilan kasus ini adalah bahwa menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD) Jawa Tengah Tahun 2018 mencatat bahwa di Kecamatan Borobudur terdapat tiga desa yang masih masuk dalam zona merah kemiskinan, yaitu Giritengah, Wringinputih, dan Ngadiharjo. Alasan awal lokus penelitian ini memilih Desa Giritengah karena letaknya lebih jauh dibanding Desa Wringinputih, dan Ngadiharjo dari Candi Borobudur. Namun, pada tahun 2020 dalam data MCN bahwa Balkondes Wringinputih dan Ngadiharjo masuk ke dalam daftar Balkondes yang beroperasi dengan baik, sedangkan Balkondes Giritengah masuk ke dalam daftar belum beroperasi dengan baik

padahal Desa Giritengah memiliki potensi desa yang sangat menjual.

Pelaksanaan awal kegiatan Balkondes yang dimulai pada tahun 2016, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Magelang menyampaikan bahwa program dari pusat ini ketika dibahas dengan Bappeda, maka yang terjadi sebagai berikut:

“Kalau pengalaman ketemu dengan pusat ya sering berantem, jadi ketika pusatnya berencana tentang Borobudur, kami yang di kabupaten tidak dilibatkan secara intens jadi cuma ijin tiba-tiba sudah jadi”. (Wawancara, 21 Desember 2021)

Pembangunan Balkondes tidak melibatkan Bappeda dalam artian konsepnya sudah matang di pusat dan daerah terima sudah jadi, sehingga Balkondes yang dibangun ini bersifat *top down*. Terkait *top down* ini, Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Magelang sebagai berikut:

“Ini kan *top down*, sedangkan kesiapan masyarakatnya itu kurang, akhirnya kurang termultifungsi. Dari sisi pemberdayaannya, program itu kurang terus kemudian dari sisi pengelolaannya juga nggak punya inovasi ibaratnya sudah di kasih modal bagaimana mengelola mengembangkan”. (Wawancara, 21 Desember 2021)

Kemudian, Staf MCN menyampaikan hal serupa sebagai berikut:

“*Top down* banget, wes wes wesss jadi. *Social engineering*nya kurang, sosialisasinya kurang, pondasi-pondasinya ya mungkin biar cepet kan”. (Wawancara, 22 Desember 2021)

Pendekatan *top down* memberikan dampak terhadap kurangnya kesiapan masyarakat, sehingga tidak bisa mengembangkan konsep yang diberikan. Secara empiris dalam (Tohopi, 2021: 150-151) bahwa *top down* memiliki berbagai

kekurangan dan kelemahan sehingga kepentingan public senantiasa terabaikan.

Balkondes Giritengah bangunannya sama dengan Balkondes lainnya, yaitu terdiri dari pendopo, resto, dan *homestay* atau *pondokstay*. Pendopo Balkondes Giritengah dijadikan satu dengan resto, resto di sajikan dengan berbagai macam bentuk kursi dari bambu, dan pada pendopo tengah terdapat latar yang diperuntukkan jika ada pertunjukan. *Homestay* Giritengah terdiri dari sepuluh kamar dengan harga perkamar Rp 375.000. *Homestay* Balkondes Giritengah memiliki latar yang sangat asri sekali, karena latar itu adalah hamparan Bukit Menoreh. Antara *Homestay* dan pendopo resto di hubungkan dengan sebuah jembatan yang melintasi sungai, suara dari aliran sungai membuat suasa pedesaan menjadi kental.

Awal pelaksanaan Balkondes Giritengah dimulai dari kedatangan TWC membawa bahan bangunan yang kemudian di bangun, Balkondes Giritengah di sponsori oleh Jasa Raharja. Sponsor dalam (Mafaza, 2020: 8) tidak pernah melakukan pendampingan apapun, melainkan hanya memberi apa saja yang dibutuhkan Balkondes dalam segi fasilitas.

Balkondes yang dibangun dengan harapan bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, ternyata tidak semua produk dari potensi desa di tampilkan dalam etalase yang terletak di Balkondes, melainkan hanya topeng buto ijo dan madu pak Bambang. Madu pak Bambang dibeli oleh BUMDes kemudian label produk diganti menjadi label Balkondes Giritengah. Selain itu, produk yang ditampilkan di etalase harus mendapat izin dari Kades terlebih dahulu.

Pak Tijab pernah berupaya untuk memperkenalkan sanggarnya melalui plang yang di pasang di simpang Balai Desa, namun hilang setelah beberapa hari. Plang tersebut dipasang dengan tujuan memperkenalkan sanggar Pak Tijab karena di Balkondes tidak ada logo

ataupun informasi terkait Sanggar Ngestigiri.

Etalase desa yang terletak di Balkondes dalam (Maemunah, 2019: 24) seharusnya menampilkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga pengunjung, tamu ataupun wisatawan bisa melihat untuk kemudian mengunjungi masing-masing tempat dimana potensi itu berada sesuai dengan ketertarikan pengunjung. Sehingga, waktu kunjungan wisatawan lebih lama dan potensi yang dimiliki desa lebih dikenal.

Selain produk, *homestay* juga mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya, bahwa *homestay* yang dibangun tidak sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai program pemberdayaan. *Homestay* menurut Lanier dan Berman dalam (Wedatama, 2018:138) merupakan keadaan dimana wisatawan yang berkunjung kesuatu destinasi wisata memilih untuk menyewa fasilitas selama berwisata berupa rumah tinggal pribadi masyarakat yang memiliki kamar kosong didalamnya dengan tujuan untuk bertemu dan berwisata antara wisatawan dan pemilik rumah sembari menambah penghasilan kepada pemilik rumah dari biaya yang dibebankan kepada wisatawan tersebut.

Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinsparpora Kabupaten Magelang menyampaikan sebagai berikut:

"*Homestay* itu seperti *pondokstay*, sempat protes. *Homestay* itu rumah atau bangunan yang jadi satu dengan pemiliknya dan yang dijual maksimal kamar karena harus berinteraksi dengan yang punya rumah. Salah konsep. Karena fungsinya kan pemberdayaan masyarakat". (Wawancara, 21 Desember 2021)

Disparpora sempat protes mengenai pembangunajn *homestay* yang tidak sesuai dengan konsep *homestay*. Program *homestay* di pedesaan adalah salah satu dari program prioritas utama dalam sektor pariwisata nasional, hal tersebut dalam rangka mendukung

pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata desa sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung program *homestay*, yang keudian akan berdampak memberikan dampak positif terhadap pengembangan desa wisata itu sendiri, dan bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa wisata. Jika dimaknai, *homestay* berarti rumah tinggal masyarakat yang sebagaimana kamarnya disewakan kepada wisatawan dalam rentang waktu tertentu, kemudian wisatawan yang menjadi tamu tersebut dapat mempelajari rutinitas tertentu atau budaya setempat (Krisnawati, 2018:1813).

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Magelang sebagai berikut:

"Geger budaya tadi bahwa ketika BUMN masuk bikin Balkondes ada penginapan konsep yang dibangun oleh menteri waktu itu adalah anda miskin nih sekarang dikasih fasilitas yang *high class* disitu makannya mahal, nginepnya mahal, jadi di standarkan hotel berbintang, mereka tidak siap dengan hal itu, tiba-tiba ada konsep Balkondes seperti itu yang mengadopsi dari hotel bintang tiga". (Wawancara, 21 Desember 2021)

Balkondes menyebabkan geger budaya dikalangan masyarakat akibat ketidaksiapan masyarakat. Geger budaya menurut Oberg dalam (Akbar, 2019:9) sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan geger budaya sebagai gangguan yang tidak disadari oleh individu seperti tiba-tiba pindah ke dalam suatu kebudayaan baru yang berbeda dari kebudayaan sebelumnya. Kemudian Adler dalam (Akbar, 2019:9) menjelaskan geger budaya sebagai bentuk keterasingan. Dari pengertian tersebut maka geger budaya dapat disimpulkan sebagai suatu kebingungan di masyarakat karena adanya budaya baru masuk dalam lingkungan kehidupannya yang berbeda dengan kehidupan aslinya. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda

Kabupaten Magelang menjelaskan sebagai berikut:

“Sosialisasi tapi realnya *ceremony*. Ya cuma tokoh-tokoh jadi ya nggak sampai ke semua masyarakat. Jadi apa yah.. salah sejak awal desainnya”. (Wawancara, 21 Desember 2021)

Sosialisasi yang dilakukan terkait Balkondes tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga hal tersebut merupakan suatu kesalahan. Kemudian, Desa Giritengah memiliki BUMDes. Namun, pengelola Balkondes maupun BUMDes selalu ganti-ganti setiap tahunnya, sehingga pergantian yang dilakukan setiap tahun menjadi kendala dalam kemajuan Balkondes maupun BUMDes, karena baru saja di desain sudah bubar sudah ganti. Kemudian, Ketua BUMDes menyampaikan sebagai berikut:

“Saya kerja utamanya disini (BMT Bima Cabang Salaman), jadi dari dulupun setiap ada acara saya nggak bisa. Saya belum pernah datang sama sekali karna ya memang nggak bisa. Ketua BUMDes itu dalam satu bulan itu ada tiga kali pertemuan, teman-teman nggak boleh saya mundur, padahal pertemuannya nggak hari minggu. Dulu yang gantikan pernah sekretaris tapi sudah keluar, jadi BUMDes ya nggak jalan, kadang ditegur sama ketua paguyuban, tapi ya mau gimana”. (Wawancara, 17 Desember 2021)

Balkondes sudah mengalami empat kali pergantian dan saat ini di Manajeri oleh Mas Dori. Mas Dori merupakan pemain wisata yang sudah berkecimpung lama di pariwisata, kemudian pak Kades meminta Mas Dori untuk mengurus Balkondes. Namun, Mas Dori uji coba dulu selama tiga bulan, sebagai berikut:

“Akhirnya saya membawa suatu yang baru disini, tapi ditentang masyarakat. Tentang manajemennya, tentang cara-caranya, pada bilang cah cilik wingi sore ngerti opo, saya masih 25 sedangkan atasan saya orang tua-tua tapi tidak paham teknologi dan saya tidak

memiliki power”. (Wawancara, 17 Desember 2021)

Permasalahan di Desa Giritengah bisa diselesaikan oleh Kepala Desanya, karena Kepala Desa yang menjadi pemimpin dan tentunya memiliki andil yang besar. Namun, ketika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan, berarti ada yang salah dengan Kepala Desanya. Kepala Desa Giritengah memiliki andil dalam BUMDes dan Balkondes, andil dalam BUMDes karena pendirian BUMDes harus melalui Musdes, dan pegawai Balkondes terutama untuk menjadi manajer desa ditunjuk langsung oleh desa melalui Kepala Desa, sehingga berdampak terhadap BUMDesnya, Balkondesnya, dan kebawahnya tidak akan berani mengambil langkah atau tindakan.

Tahap Evaluasi

Salah satu bentuk evaluasi adalah dengan dibentuknya PT. Manajemen CBT Nusantara. BUMN bersepakat dengan BUMN-BUMN sponsor untuk membentuk suatu badan khusus mengurus Balkondes, kemudian terbentuklah PT. Manajemen CBT Nusantara. Semasa Balkondes didampingi atau didampingi oleh TWC maupun Petra Jasa, MOU mengenai Balkondes belum disentuh, sehingga MCN pada tahun 2020 akan membuat Berita Acara Serah Terima atau BAST perihal Balkondes dan seluruh komponennya, dan untuk mencapai hal tersebut harus adanya sinergisitas antara pemerintah daerah yang terkait dengan Balkondes, pemerintah daerah dan pengurus Balkondes.

Kebijakan Balkondes yang bersifat *top down* akhirnya menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya dan membuat Pemda tidak dilibatkan dalam perumusan program Balkondes, sehingga Program Balkondes dinilai terburu-buru, karena pusat membuat keputusan dengan tidak mempertimbangkan keadaan lapangan sesungguhnya dan tidak melibatkan Pemda yang ada, bahkan dari jajaran Pemda dibuat bingung. Staf MCN menyampaikan sebagai berikut:

“Ini juga lucu di pemerintahan negara kita, kadang ego sektoral itu juga antar instansi. Jadi program Balkondes ini jadi kontroversi karna BUMN dianggap melewati semua pihak tidak koordinasi, mereka merasa terlewatkan. Kalau di balik ya kalau mau ribut, urusan pemberdayaan masyarakat harusnya urusan siapa, urusan pariwisata urusannya siapa, BUMN kan harusnya nggak ngurusin beginian, harusnya terima kasih lho dibantu kan. Kenapa ada orang bantu malah ga suka?”. (Wawancara, 22 Desember 2021)

Program Balkondes mengalami kontroversi karena adanya ego sektoral antar instansi. BUMN dianggap melewati seluruh pihak karena tidak adanya koordinasi yang dilakukan.

Staff MCN melakukan upaya untuk mengatasi supaya suatu inovasi yang sudah sesuai tidak perlu diperpanjang, karena sudah sesuai dengan tujuan melakukan pengembangan Balkondes. Balkondes Giritengah belum bisa menerima banyak tamu atau event karena ketidaksiapan Balkondes menerima, karena kepentok *power*, sebagai berikut:

“Mas Dori secara inovasi punya tetapi secara *power* tidak ada. Sehingga banyak faktor yang bisa digali kenapa nggak jalan. Dari pusat pasti membuat konsep sebagus-bagusnya tapi masalahnya dia membimbing atau nggak”. (Wawancara, 22 Desember 2021)

Persoalan BUMN membimbing atau tidak, tentu ada bimbingan karena adanya TWC dan Petra Jasa yang ditunjuk langsung oleh BUMN. Namun, memang belum maksimal dalam pendampingan yang dilakukan mengenai pengelolaan Balkondes. Kemudian, Staf MCN menyampaikan bahwa keberhasilan utama desa itu adalah kepala desa, sebagai berikut:

“Faktor yang dominan, sebenarnya terletak di leadership kepala desanya. Cuma kalau perkaranya di Desa Giritengah, ya susah. Saya kalau ketemu sama temen-temen itu, selain potensinya yang luar

biasa, potensi konfliknya juga luar biasa”. (Wawancara, 22 Desember 2021)

Kepala desa memiliki peranan penting dalam memajukan desanya. Kepala desa dalam (Armansyah, 2022: 2672) memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan desanya. Pembangunan desa seperti mengembangkan potensi desa, salah satunya melalui Balkondes. Balkondes Giritengah selain masuk ke dalam zona merah kemiskinan, ternyata masuk juga ke dalam Balkondes yang belum beroperasi dengan baik, karena potensi luar biasa desa diimbangi dengan potensi konflik yang luar biasa juga antara pengelola maupun pemiliki potensi desa.

SIMPULAN

Strategi pemberdayaan masyarakat khususnya Balkondes Giritengah dilihat dari enam tahapan strategi pemberdayaan karena tahap terminasi tidak masuk karena tidak adanya pemutusan program. Tahap persiapan belum optimal karena Balkondes yang berasal dari rancangan konsep Gerai Ekonomi Desa oleh para kades ketika diadopsi oleh BUMN tidak melibatkan masyarakat. Tahap pengkajian belum optimal, karena pengkajian yang dilakukan tidak menyeluruh bahkan tidak adanya pengkajian terlebih dahulu. Tahap perencanaan alternatif belum optimal, karena segala sesuatu terutama Balkondes harus mendapat izin dari kades yang akhirnya berdampak terhadap potensi-potensi yang dimiliki desa untuk nantinya akan ditampilkan di Balkondes. Tahap pemformalisasi kegiatan sudah optimal, karena Balkondes dan homestay dilakukan secara berbarengan. Tahap pelaksana kegiatan belum optimal, karena adanya konflik vertikal antara BUMN dan Pemkab Magelang, akibat program Balkondes menggunakan pendekatan top down. Tahap Evaluasi dari keberlangsungan Balkondes sejak pembangunan adalah terbentuknya PT. Manajemen CBT Nusantara guna khusus melakukan pendampingan. Kemudian, permasalahan

lanjutan akibat pendekatan top down adalah tidak sinergisitasnya hingga saat ini antara BUMN dan Pemkab Magelang dalam program Balkondes, walaupun Balkondes ditujukan sebagai fasilitas pendukung pariwisata Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Ivan. (2019). Balkondes Nafas Baru Wisata di Borobudur. Dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/kedu/balkondes-nafas-baru-wisata-di-borobudur/>
- Akbar, N Wasissa. (2019). Hubungan antara Efikasi Diri dan Geger Budaya pada Mahasiswa Rantau di Yogyakarta. *Skripsi*, 9.
- Anwas, M. Oos. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Anindya Putri Raflesia. (2017). Pendekatan Community Based Tourism dalam Membina Hubungan Komunitas di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(1): 113.
- Arintoko, dkk. (2019).. Peran Balai Ekonomi Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, (609-610).
- Armansyah, dan Yurianto. (2022). Peran Kepala Desa dalam Mengelola Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8): 2672.
- Fatimah, Titin dkk. (2018).. Pemetaan Budaya di Kawasan Pedesaan: Studi Kasus Desa Giritengah, Borobudur. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, 2(2):566,568-569.
- Firmansyah, Haris. (2019). Pengunjung Borobudur Sih Banyak, tapi Warga Lokal Tak Sejahtera. Dalam <https://mojok.co/hrf/ulasan/pojokan/pengunjung-borobudur-sih-banyak-tapi-warga-lokal-tak-sejahtera/>
- Gischa, Serafica. (2019). Tujuh Keajaiban Dunia, Ke Mana Borobudur?. Dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/22/080000869/tujuh-keajaiban-dunia-ke-mana-borobudur-?page=all>
- Harsana, Minta. (2015).. Aspek-Aspek Pengembangan Pariwisata Kawasan Borobudur. *Jurnal UNY*, 10(1): 1-4.
- Kurniawan, Dedy. (2020).. Pengaturan Corporate Social Responsibility oleh Pemerintah Daerah. *Jurist-Diction*, 3(3): 879.
- Krisnawati, Nila dan Dian Krisasnto. (2018).. Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata melalui Homestay dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan di Tanjung Lesung Jawa Barat. *Prosiding PKM-CSR*, Vol 1:1813.
- Maemunah, Ita dkk. (2019). Kualitas Pelayanan Restoran Balkondes di Sekitar Kawasan Candi Borobudur. *Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 6(1): 24.
- Mafaza, Ardhia dan Kristina Setyowati. (2020). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1): 8.
- Sugiarto, Antonius dan I Gusti Agung Oka Mahagangga. (2020). Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Komponen Produk Pariwisata). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(2): 18.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururi, Ahmad. (2015).. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Verdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2): 2.
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Express.
- Tohopi, Rustam dkk. (2021). Model Perumusan Kebijakan "Public Mechanism Approach" Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2): 150-151.
- Wedatama, Abid Affandii dan Fadjar Hari Madiansjah. 2018. Pengembangan Homestay Berbasis Masyarakat Pada Kampung Homestay Borobudur. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2):138.